

# **Partisipasi Masyarakat dalam Pelaksanaan Good Governance Melalui *E-Government* di Kabupaten Sleman Tahun 2012-2015.**

Jen Salafian Dr. Ulung Pribadi, M.Si.  
jensalafian@gmail.com

Program Studi Ilmu Pemerintahan  
Fakultas Ilmu Sosial dan Politik  
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

## **SINOPSIS**

Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan *good governance* melalui *e-government* masih dirasakan belum berjalan sesuai dengan yang diharapkan pemerintah, baik yang menyangkut dengan sistem layanan yang berbeda-beda, tidak transparan, kurang inopatif sehingga menyebabkan permasalahan pada kesiapan masyarakat, penggunaan layanan *e-government* dan masalah akses dalam *e-government* Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat partisipasi masyarakat dan mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat di Kabupaten Sleman dalam pelaksanaan *good governance* melalui *e-government* tahun 2012-2015. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kuantitatif, dengan cara menyebarkan 100 kuisioner tertutup kepada masyarakat Kabupaten Sleman, melakukan wawancara kepada staff bagian Kominfo Kabupaten Sleman, dan pengamatan langsung di lapangan. Penelitian ini menghasilkan beberapa hal penting untuk mendorong dalam peningkatan partisipasi masyarakat melalui *e-government*.

Partisipasi masyarakat melalui *e-Government* di Kabupaten Sleman masih **kurang baik** dibuktikan dari hasil nilai rata-rata tolak ukur partisipasi masyarakat melalui *e-government*, pertama sosialisasi kepada masyarakat cukup baik mendapat nilai sebesar 333, kedua pelayanan *e-government* kurang baik mendapatkan nilai sebesar 403, ketiga evaluasi alternatif cukup baik mendapatkan nilai sebesar 289, keempat keputusan berpartisipasi kurang baik mendapatkan nilai sebesar 399, kelima perilaku setelah berpartisipasi kurang baik mendapatkan nilai sebesar 356. Jadi hasil perhitungan jawaban responden secara keseluruhan menggunakan metode analisis linkert yaitu, jumlah skor yang di peroleh sebesar 1780 dibagi jumlah skor maksimal sebesar 356 dikali 100% hasilnya 50% responden yang menjawab telah berpartisipasi melalui *e-Government* di Kabupaten Sleman. Maka partisipasi melalui *e-Government* dipengaruhi oleh independen variable. Hal tersebut terlihat dari hasil korelasi sederhana antara indeviden variable terhadap devenden variable yang mana nilai korelasi kesiapan masyarakat (X1) dengan nilai 0.000, Penggunaan Layanan *E-Government* (X2) dengan nilai 0.001, masalah akses (X3) dengan nilai 0.012 dan Partisipasi masyarakat (Y) memperoleh nilai 0.000 lebih kecil dari alpha 0.05 di Kabupaten Sleman.

**Kata Kunci:** *Partisipasi Masyarakat, Good Governance, E-Government.*

## **PENDAHULUAN**

Globalisasi membawa perubahan gaya hidup, sarana komunikasi dan nilai-nilai budaya dan tradisi di sisi pemerintah maupun masyarakat. Globalisasi juga mendorong perubahan paradigma yang mendasar pada tata kelola pemerintahan. Dalam kaitannya dengan mekanisme, praktek dan tata kelola pemerintahan yang baik dimana telah terjadi revolusi teknologi dan informasi yang akan mempengaruhi terjadinya perubahan aparatur Negara Indonesia ( Sumarto, 2004). Tata kelola yang baik menciptakan nilai, fungsi dan kebutuhan teknologi informasi yang

dikemas dalam bentuk *e-Government* atau pemerintahan secara elektronik untuk menciptakan partisipasi masyarakat yang lebih cepat, lebih baik, dan lebih murah perlu untuk segera diterapkan dan dikelola. Kemampuan masyarakat untuk berpartisipasi dalam revolusi informasi akan menentukan masa depan kesejahteraan bangsa.

Perkembangan teknologi dan informasi sudah mencapai perkembangan yang sangat pesat. Aplikasi internet sudah digunakan untuk *e-Commerce* atau pelayanan barang dan jasa secara online berkembang pada pemakaian aplikasi internet pada lingkungan pemerintah yang dikenal dengan *e-Government*. Pemerintah daerah dan pemerintah pusat secara terpadu telah menjadi prasyarat penting untuk mencapai *good governance* dalam rangka meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat dalam berbagai kegiatan pemerintahan. Pengembangan aplikasi *e-Government* memerlukan pendanaan yang cukup besar sehingga diperlukan kesiapan dari sisi sumber daya manusia aparat pemerintahan dan kesiapan dari masyarakat.

Menurut Sumarto (2004) *good governance* diartikan sebagai mekanisme, praktek dan tata cara pemerintah dan warga mengatur sumber daya serta memecahkan masalah-masalah publik. Tata laksana pemerintahan yang baik atau *good governance* adalah seperangkat proses yang diberlakukan dalam organisasi baik swasta maupun negeri untuk menentukan keputusan. Tata laksana pemerintahan yang baik ini walaupun tidak dapat menjamin sepenuhnya segala sesuatu akan menjadi sempurna. Namun, apabila dipatuhi jelas dapat mengurangi penyalahgunaan kekuasaan dan korupsi. Banyak badan-badan donor internasional, seperti IMF dan Bank Dunia, mensyaratkan diberlakukannya unsur-unsur tata laksana pemerintahan yang baik, seperti *the state, the private sector, civil society* dan *organizations* sebagai dasar bantuan dan pinjaman yang akan mereka berikan (UNDP, 2000).

Kabupaten Sleman adalah salah satu Kabupaten/Kota di Indonesia yang telah menerapkan instruksi presiden No. 03 Tahun 2003 tentang kebijakan dan pengembangan *e-Government* yaitu dengan adanya website resmi pemerintah Kabupaten Sleman dengan alamat domain.

Perkembangan *e-Government* di Kabupaten Sleman sendiri tergolong sudah lama. Pembangunan *e-Government* dimulai tahun 2006 dan mulai efektif mulai tahun 2010 dibawah pengelolaan Bidang Kominfo, Dinas Perhubungan, Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Sleman sebagai unsur yang bertanggung jawab didalam pembangunan dan pengembangan *e-Government* di Kabupaten Sleman. Di tahun 2012 pembangunan *e-Government* mulai berjalan efektif sebagai pelaksanaan dari Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik. Didukung dengan adanya prestasi di tingkat daerah maupun ditingkat nasional yaitu berupa sebagai terbaik I Reka Cipta Bhakti Nugraha Tahun 2015. Penghargaan ini merupakan penghargaan sebagai Kabupaten/Kota terbaik di antara empat Kabupaten dan Kota di DIY dari sisi perencanaan pembangunan daerah dengan melihat Rencana Kerja Pembangunan Daerah (Wikipedia, 2015).

Di tingkat Nasional sebagai peraih penghargaan tertinggi kategori pemerintahan yaitu *the best champion Government Category* dalam ajang digital *Society Award* 2014 (Awarding IDSA, 2015). Kabupaten Sleman memperoleh peringkat ke-2, pada kategori *E-Education* Pemkab. Kabupaten Sleman memperoleh peringkat ke-1, pada kategori *E-Tourism* memperoleh peringkat ke-2, dan pada kategori *E-Government* memperoleh peringkat ke-1 (Awarding IDSA, 2015).

Namun dibalik keberhasilan di Kabupaten Sleman bukan berarti tanpa adanya masalah pada partisipasi masyarakat dalam memanfaatkan fasilitas yang sudah disediakan pemerintah, *Prasurvey* yang dilakukan peneliti menunjukkan bahwa tidak semua format dan konten yang ada pada *website* Kabupaten Sleman berfungsi sebagai mana semestinya. Contohnya ada beberapa sub domain yang diakses loading begitu lama sampai gagal loading sehingga hal inilah yang akan mengurangi ketertarikan masyarakat Kabupaten Sleman untuk mulai menggunakan dan terlibat langsung dalam pelaksanaan *good governance* melalui *e-Government*.

Berdasarkan penjelasan diatas mengingat pentingnya pelaksanaan *good governance* pada implementasi *e-Government* sebagai media partisipasi masyarakat dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik maka peneliti sangat tertarik dengan fenomena pelaksanaan *good governance* melalui *e-Government* di Kabupaten Sleman untuk mengetahui sejauh mana partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan konsep tata kelola pemerintahan yang baik melalui *e-Government*, oleh karna itu perlu pengamatan dan pengkajian lebih lanjut. Atas dasar itulah peneliti mengambil judul “**Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan Good Governance melalui e-Government di Kabupaten Sleman Tahun 2012-2015**”.

## **PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PELAKSANAAN GOOD GOVERNANCE MELALUI E-GOVERNMENT DI KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2012-2015.**

Pada bagian ini akan diukur mengenai tingkat partisipasi masyarakat melalui *e-government* berdasarkan tolok ukur pada masing-masing indikator.

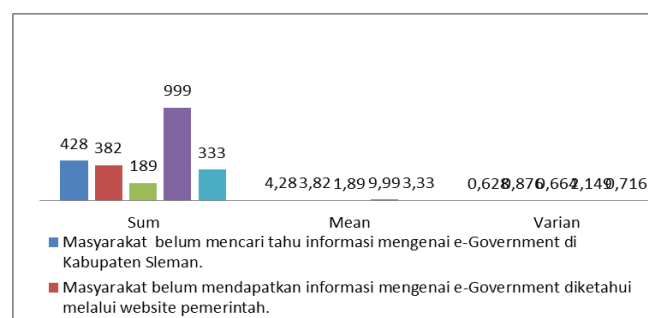
### **1. Analisis Partisipasi Masyarakat dalam E-Government**

#### **a) Sosialisasi E-Government Kepada Masyarakat**

Indikator ini memiliki tiga tolok ukur, yaitu masyarakat belum mencari tahu informasi mengenai *e-Government* di Kabupaten Sleman, masyarakat belum mendapatkan informasi mengenai *e-Government* melalui website pemerintah, dan Pemberitahuan mengenai adanya *e-Government* bagi masyarakat belum dilakukan secara jelas oleh pemerintah yang mengacu pada teori (Krina, 2003):

Diagram 3. 10

Indikator Sosialisasi *e-government* kepada Masyarakat



Sumber: *Data primer yang diolah, 2016*

Masyarakat sudah diberitahukan mengenai *e-Government* secara jelas oleh pemerintah melalui website resmi pemerintah Kabupaten Sleman. Hal ini didukung pula oleh hasil perhitungan tolok ukur ini, sebesar 382. Pemberitahuannya-pun masih kurang

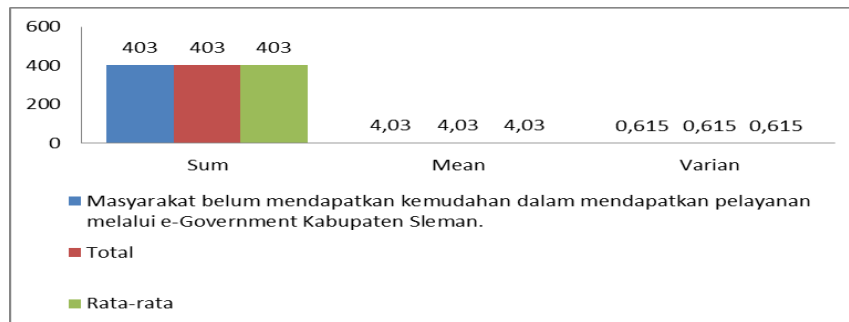
jelas, dengan perolehan skor yang didapatkan sebesar 428. Diketahui bahwa sebagian besar dari responden sebelumnya tidak pernah mencari informasi tentang pelayanan melalui *e-Government* dengan skor sebesar 189.

**b) Pelayanan *E-Government***

Mengacu pada teori Krina (2003) indikator ini memiliki satu tolok ukur, yaitu masyarakat belum mendapatkan kemudahan dalam mendapatkan pelayanan melalui *e-Government* akan membantu pemecahan masalah pelayanan yang dihadapi masyarakat. Berikut adalah perhitungan dari tiap tolok ukur tersebut :

Diagram 3. 11

Pelayanan *E-Government*



Sumber: *Data primer yang diolah, 2016*

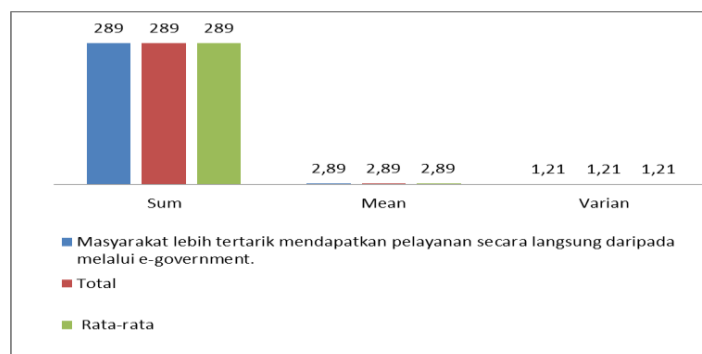
Sebagian responden setuju dengan pernyataan “masyarakat belum mendapatkan kemudahan dalam mendapatkan pelayanan melalui *e-Government* akan membantu pemecahan masalah pelayanan yang dihadapi masyarakat, Hal ini dibuktikan dengan jawaban responden sebesar 403. Dengan demikian, secara keseluruhan skor yang diperoleh pada indikator ini adalah sebesar 403 (di atas median).

**c) Evaluasi Alternatif**

Mengacu pada teori Krina (2003) indikator ini memiliki satu tolok ukur, yaitu Masyarakat lebih tertarik mendapatkan pelayanan secara langsung daripada melalui *e-Government*. Berikut adalah perhitungan dari tiap tolok ukur tersebut :

Diagram 3. 12

Evaluasi Alternatif



Sumber: *Data primer yang diolah, 2016*

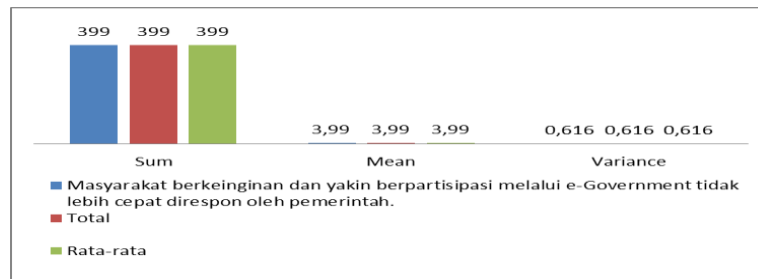
Masyarakat di Kabupaten Sleman lebih tertarik mendapatkan pelayanan secara langsung dibuktikan dengan jawaban responden sebesar 289 dari pada mendapatkan pelayanan melalui *e-Government*. Dengan demikian total nilai sebesar 289 (dibawah median).

#### d) Keputusan Berpartisipasi

Mengacu pada teori Krina (2003) indikator ini memiliki satu tolok ukur, yaitu Berkeinginan dan yakin berpartisipasi melalui *e-Government* tidak lebih cepat oleh direspon oleh pemerintah. Berikut adalah perhitungan dari tiap tolok ukur tersebut :

Diagram 3. 13

Keputusan Berpartisipasi



Sumber: *Data primer yang diolah, 2016*

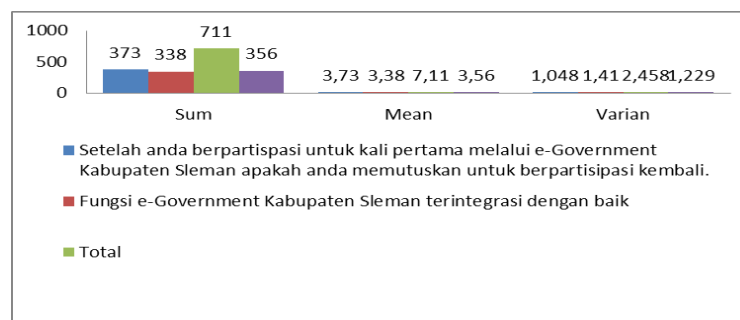
Masyarakat di Kabupaten Sleman sudah mulai berkeinginan dan yakin jika berpartisipasi melalui *e-Government* akan lebih cepat direspon oleh pemerintah, dengan mendapatkan nilai sebesar 399.

#### e) Perilaku Setelah Berpartisipasi

Mengacu pada teori Krina (2003) indikator ini memiliki dua tolok ukur, yaitu setelah anda berpartisipasi untuk kali pertama melalui *e-Government* Kabupaten Sleman apakah anda memutuskan untuk berpartisipasi kembali dan Fungsi *e-Government* Kabupaten Sleman terintegrasi dengan baik. Berikut adalah perhitungan dari tiap tolok ukur tersebut :

Diagram 3. 14

Perilaku Setelah Berpartisipasi



Sumber: *Data primer yang diolah, 2016*

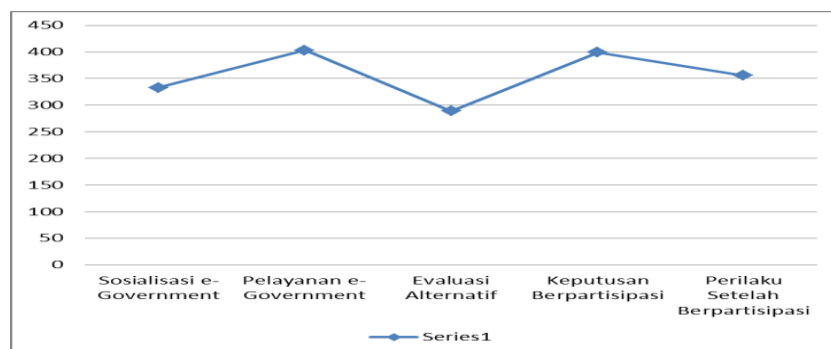
Fungsi *e-Government* Kabupaten Sleman terintegrasi dengan baik dibuktikan dengan jawaban responden sebesar 338, dan sebagian lebih responden juga akan

memutuskan untuk berpartisipasi kembali setelah berpartisipasi untuk kali pertamanya melalui *e-Government* dibuktikan dengan jumlah jawaban responden sebesar 373. Dengan demikian jumlah semuanya sebesar 353 (diatas median).

Dari hasil pengukuran tingkat partisipasi masyarakat yang dilakukan pada setiap tolok ukur yang ada, kita dapat mengetahui berapa skor yang diperoleh oleh masing-masing indikator. Berdasarkan hasil tersebut, kita juga dapat mengetahui seberapa besar tingkat partisipasi masyarakat melalui *e-Government*, dengan melihat skor keseluruhan yang diperoleh berdasarkan indikator-indikator yang ada, dengan melihat diagram berikut ini :

Diagram 3. 15

Tingkat Partisipasi Masyarakat



Sumber: Data primer yang diolah, 2016

Dari diagram tersebut dapat diketahui bahwa skor masing-masing indikator yang ada yaitu sosialisasi *e-Government* kepada masyarakat (333.00), pengorganisasian Masyarakat (KSM) (403.00), evaluasi alternatif (289.00), keputusan berpartisipasi (399.00), dan perilaku setelah berpartisipasi (356.00) Dengan demikian hanya satu tolak ukur yang berada di bawah median yaitu evaluasi alternatif yaitu, sebesar (289) sedangkan mediannya dalam penelitian ini berjumlah (300). Hal ini menunjukkan bahwa belum semua tolak ukur yang ada sudah dipenuhi oleh masyarakat Kabupaten Sleman.

Untuk mengetahui besarnya tingkat partisipasi masyarakat, dapat dilihat dari skor keseluruhan yang diperoleh. Pada diagram tersebut terlihat bahwa skor keseluruhan yang diperoleh adalah sebesar 356.00. Skor tersebut berada diantara area **kuartil I < skor < median**, atau pada area kurang baik. Sehingga dapat dikatakan bahwa tingkat partisipasi masyarakat Kabupaten Sleman dalam berpartisipasi melalui *e-Government* **kurang aktif**. Apabila dipersentasekan, maka besarnya tingkat partisipasi adalah :

$$\begin{aligned} \text{Tingkat Partisipasi} &= \frac{\text{Skor yang diperoleh}}{\text{Skor Maksimal}} \times 100\% \\ \text{Tingkat Partisipasi} &= \frac{1780}{356} \times 100\% \\ &= 50\% \end{aligned}$$

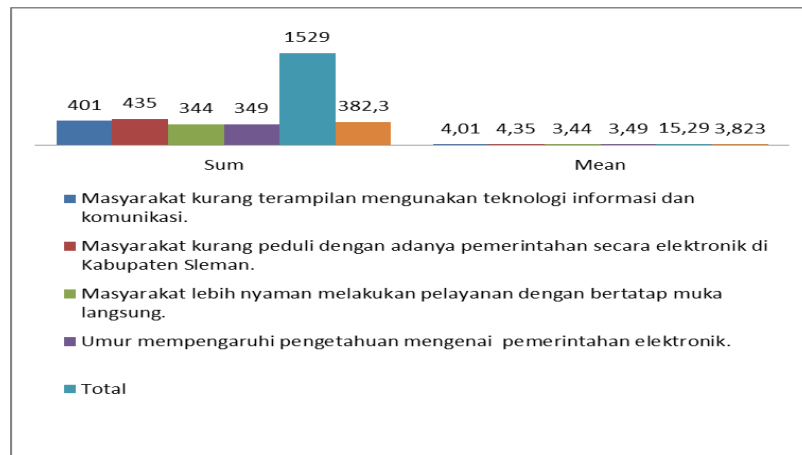
## 2. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Partisipasi Masyarakat

### a) Kesiapan Masyarakat

Sesuai dengan teori yang dikemukakan Yonasi & Boonstra (2010) indikator ini memiliki empat tolok ukur, yaitu masyarakat kurang terampilan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi, masyarakat kurang peduli dengan adanya pemerintahan secara elektronik di Kabupaten Sleman, masyarakat lebih nyaman melakukan pelayanan dengan bertatap muka langsung, umur mempengaruhi pengetahuan mengenai pemerintahan elektronik sebagai berikut :

Tabel 3. 16

#### Kesiapan Masyarakat



Sumber: Data primer yang diolah, 2016

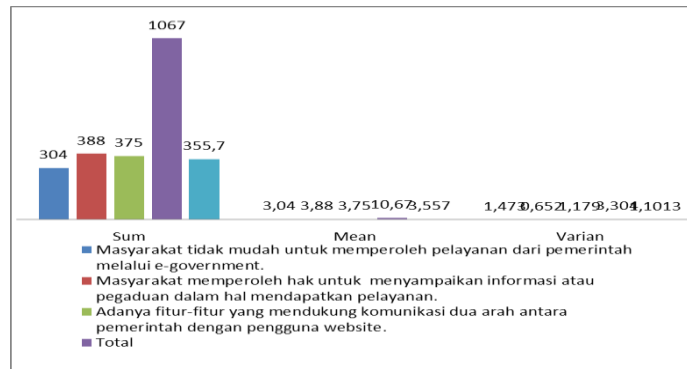
Dari tabel diatas masyarakat kurang terampil menggunakan teknologi dan informasi memperoleh nilai 4.01 ditingkat **tidak baik**, didukung dengan masyarakat kurang peduli dengan adanya *e-Government* di Kabupaten Sleman memperoleh nilai, sebesar 4.35, umur mempengaruhi dengan nilai sebesar 3.49, dan masyarakat lebih nyaman bertatap muka langsung dalam berpartisipasi di Kabupaten Sleman dibuktikan dengan nilai, sebesar 3.44. Indikator kesiapan masyarakat memperoleh nilai rata-rata total sebesar 382, masih diatas median sebesar 300, artinya kesiapan masyarakat mempengaruhi partisipasi masyarakat melalui *e-Government*.

### b) Keinginan Masyarakat

Indikator ini memiliki tiga tolok ukur yaitu, masyarakat tidak mudah untuk memperoleh pelayanan dari pemerintah melalui *e-Government*, masyarakat memperoleh hak untuk menyampaikan informasi atau pegaduan dalam hal mendapatkan pelayanan, Adanya fitur-fitur yang mendukung komunikasi dua arah antara pemerintah dengan pengguna website. Berikut adalah perhitungannya :

Diagram 3. 17

Keinginan Masyarakat



Sumber: Data primer yang diolah, 2016

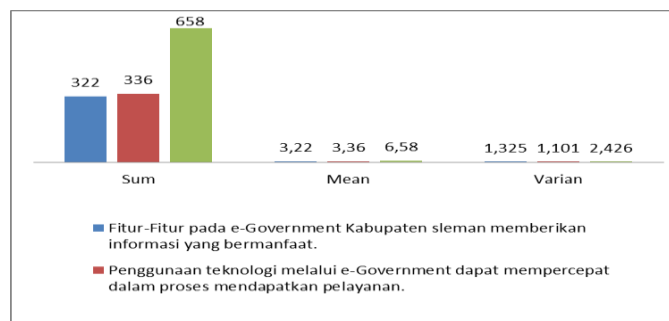
Pada tolak ukur ini masyarakat memperoleh hak untuk menyampaikan informasi dan pengaduan dalam hal memperoleh pelayanan mendapatkan nilai tertinggi, sebesar 3.88, lalu menurut responden fitur-fitur yang mendukung komunikasi dua arah masih kurang baik dengan mendapatkan nilai sebesar, 3.75 dan masyarakat belum mudah dalam mendapatkan pelayanan melalui *e-Government* dengan memperoleh nilai sebesar, 3.04. dengan total rata-rata memperoleh nilai sebesar 357, Indikator keinginan masyarakat masih diatas median yaitu sebesar 300. Artinya indikator keinginan masyarakat masih mempengaruhi partisipasi masyarakat melalui *e-Government*.

c) Manfaat

Indikator ini memiliki dua tolok ukur, yaitu fitur-fitur pada *e-Government* Kabupaten sleman memberikan informasi yang bermanfaat, penggunaan teknologi dapat meningkatkan efisiensi proses yang dilakukan pengguna. Berikut adalah perhitungan dari tiap tolok ukur tersebut.

Diagram 3. 18

Manfaat



Sumber: Data primer yang diolah, 2016

Masyarakat dapat memperoleh pelayanan lebih cepat melalui *e-Government* dengan mendapatkan nilai sebesar 3.36 dan fitur-fitur *e-Government* di Kabupaten Sleman sudah dapat memberikan informasi yang bermanfaat dengan memperoleh nilai sebesar 3.36 dengan total nilai rata-rata 329 diatas median sebesar 300, artinya indikator ini masih mempengaruhi partisipasi masyarakat melalui *e-Government*.



Dari Tiga tabel diatas dapat diketahui bahwa skor masing-masing indikator yang ada yaitu kesiapan masyarakat (382.3), keinginan masyarakat (355.7), manfaat (329). Dengan demikian semua indikator sudah berada diatas median penelitian (300). Untuk mengetahui pengaruh indikator kesiapan masyarakat dapat dilihat dari hasil hitungan berikut :

$$\text{Pengaruh Kesiapan Masyarakat} = \frac{\text{Skor yang diperoleh}}{\text{Skor Maksimal}} \times 100\%$$

$$\text{Pengaruh Kesiapan Masyarakat} = \frac{1067}{355.67} \times 100\%$$

$$= 30\%$$

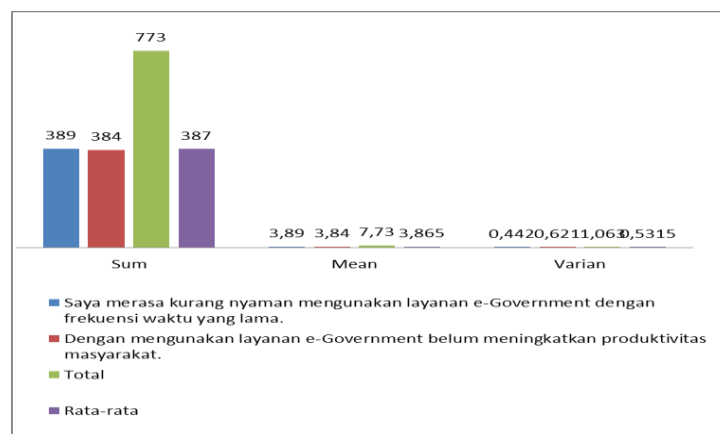
### 3. Penggunaan Layanan *E-Government*

#### a) Penggunaan Aktual

Berdasarkan teori *actual use* dalam jurnal Wibowo (2009) indikator ini memiliki dua tolok ukur, yaitu saya merasa kurang nyaman menggunakan layanan *e-Government* dengan frekuensi waktu yang lama, dengan menggunakan layanan *e-Government* belum dapat meningkatkan produktivitas masyarakat. Berikut adalah perhitungan dari tiap tolok ukur tersebut :

Diagram 3. 19

Penggunaan Aktual



Sumber: Data primer yang diolah, 2016

Masyarakat kurang nyaman menggunakan layanan *e-Government* dalam waktu yang lama dengan mendapatkan nilai sebesar 389, dengan menggunakan layanan melalui *e-Government* belum meningkatkan produktifitas masyarakat dengan mendapatkan nilai sebesar 384, dengan nilai total rata-rata sebesar 387, diatas median 300, artinya tolak ukur penggunaan aktual mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam berpartisipasi melalui *e-Government*.

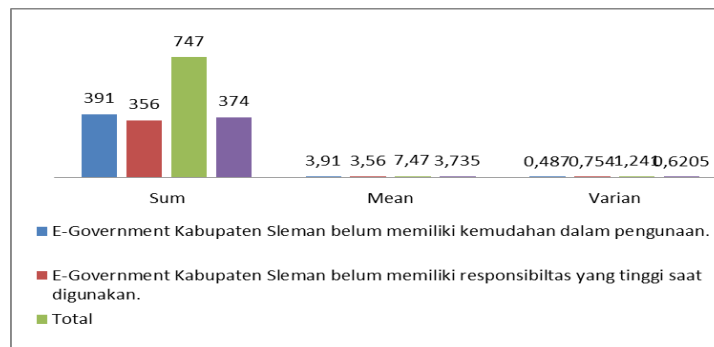
#### b) Kemudahan Penggunaan

Indikator ini memiliki dua tolok ukur, yaitu *e-Government* Kabupaten Sleman belum memiliki kemudahan dalam penggunaan, *e-Government* Kabupaten Sleman memiliki

responsibilitas yang tinggi saat digunakan hal ini sesuai dengan teori *ease of use* dalam jurnal Azhari & Sari (2008). Berikut adalah perhitungan dari tiap tolok ukur tersebut :

Diagram 3. 20

Kemudahan Penggunaan



Sumber: Data primer yang diolah, 2016

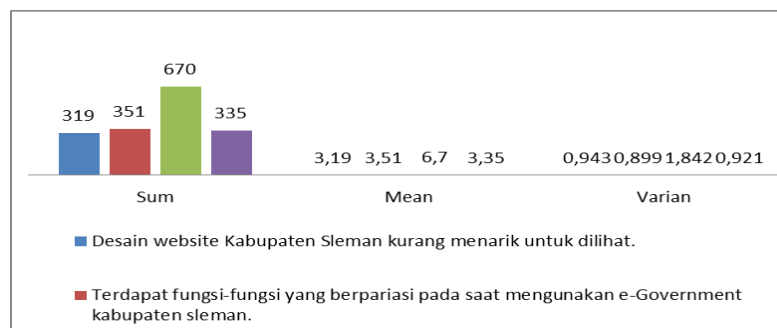
Masyarakat masih belum mendapatkan kemudahan dalam menggunakan *e-Government* dengan mendapat nilai sebesar 391, dan *e-Government* kabupaten sleman belum mendapatkan responsibilita yang tinggi saat digunakan dengan mendapatkan nilai sebesar 356, dan total rata-rata sebesar 374, masih diatas median, itolak ukur kemudahan penggunaan mempengaruhi partisipasi masyarakat melalui *e-Government*.

c) Sikap Penggunaan

Indikator ini memiliki dua tolok ukur, yaitu desain website Kabupaten Sleman kurang menarik untuk dilihat, Terdapat fungsi-fungsi yang berpariasi pada saat menggunakan *e-Government* kabupaten sleman. Berikut adalah perhitungan dari tiap tolok ukur tersebut :

Diagram 3. 21

Sikap Penggunaan



Sumber: Data primer yang diolah, 2016

Desain website di Kabupaten Sleman kurang menarik untuk dilihat dengan memperoleh nilai sebesar 319, dan sudah terdapat fungsi-fungsi yang berpariasi pada saat menggunakan *e-Government* di Kabupaten Sleman, dengan jumlah total rata-rata sebesar 335, diatas median sebesar 300, dan tolok ukur sikap penggunaan mempengaruhi masyarakat dalam berpartisipasi melalui *e-Government*.

Dari Tiga tabel tersebut dapat diketahui bahwa skor masing-masing indikator yang ada yaitu kesiapan masyarakat (382.3), keinginan masyarakat (355.7), Manfaat (329). Dengan demikian semua indikator sudah berada diatas median penelitian (300). Untuk mengetahui Pengaruh Indikator Kesiapan Masyarakat dapat dilihat dari hasil hitungan berikut :

$$\text{Pengaruh Penggunaan Layanan E – Government} = \frac{\text{Skor yang diperoleh}}{\text{Skor Maksimal}} \times 100\%$$

$$\text{Pengaruh Penggunaan Layanan E – Government} = \frac{1096}{365.33} \times 100\%$$

$$= 30\%$$

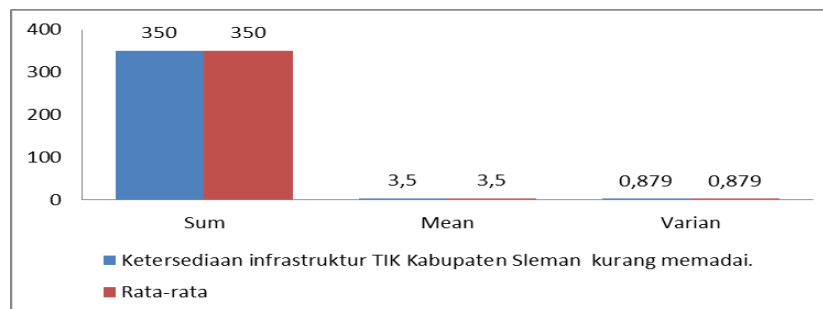
#### 4. Masalah Akses

##### a) Infrastruktur

Indikator ini memiliki satu tolok ukur, yaitu ketersediaan infrastruktur TIK Kabupaten Sleman kurang memadai. Berikut adalah perhitungan dari tiap tolok ukur tersebut :

Diagram 3. 22

##### Infrastruktur



Sumber: Data primer yang diolah, 2016

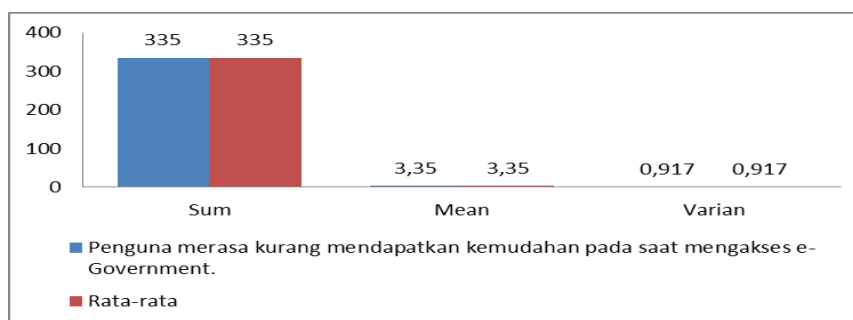
Ketersediaan infrastruktur TIK untuk mendukung masyarakat dalam berpartisipasi melalui *e-Government* masih kurang memadai dengan mendapatkan nilai sebesar 350, masih diatas median sebesar 300. Tolak ukur infrastruktur mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam berpartisipasi melalui *e-Government*.

##### b) Petunjuk Penggunaan

Indikator ini memiliki satu tolok ukur, yaitu pengguna merasa kurang mendapatkan kemudahan pada saat mengakses *e-Government*.. Berikut adalah perhitungan dari tiap tolok ukur tersebut :

Diagram 3. 23

Petunjuk Penggunaan



Sumber: *Data primer yang diolah, 2016*

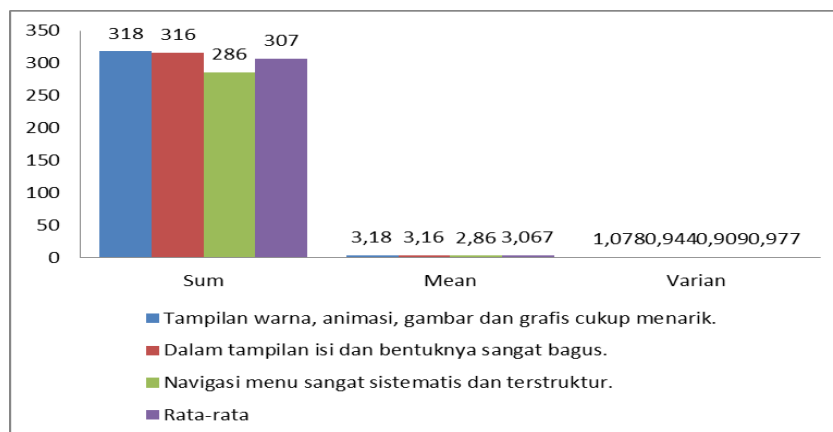
Tolak ukur ini pengguna merasa kurang mendapatkan kemudahan pada saat mengakses *e-Government* dengan mendapatkan nilai sebesar 335, diatas median sebesar 300 dengan nilai total rata-rata sebesar 355. Tolak ukur petunjuk penggunaan mempengaruhi partisipasi masyarakat.

c) **Tampilan Konten dan Navigasi**

Indikator ini memiliki tiga tolok ukur, yaitu Tampilan warna, animasi, gambar dan grafis cukup menarik, Dalam tampilan isi dan bentuknya sangat bagus, Navigasi menu sangat sistematis dan terstruktur. Dalam tampilan isi dan bentuknya sangat bagus. Berikut adalah perhitungan dari tiap tolok ukur tersebut :

Diagram 3. 24

Tampilan Konten dan Navigasi



Sumber: *Data primer yang diolah, 2016*

Tampilan warna, animasi gambar dan grafis cukup menarik dengan mendapatkan nilai sebesar 318, isi tampilan dan bentuk websitenya baik dengan mendapatkan nilai sebesar 316, dan navigasi belum sistematis dan terstruktur dengan nilai sebesar 282 dengan nilai total rata-rata sebesar 307, masih diatas median sebesar 300.

Dari Tiga tabel tersebut dan Sesuai dengan teori yang dikemukakan Yonasi & Boonstra (2010) dapat diketahui bahwa skor masing-masing indikator yang ada yaitu kesiapan masyarakat (382.3), keinginan masyarakat (355.7), Manfaat (329). Dengan

demikian semua indikator sudah berada diatas median penelitian (300). Untuk mengetahui pengaruh indikator kesiapan masyarakat dapat dilihat dari hasil berikut :

$$\text{Pengaruh Masalah Akses} = \frac{\text{Skor yang diperoleh}}{\text{Skor Maksimal}} \times 100\%$$

$$\text{Pengaruh Masalah Akses} = \frac{992}{330.67} \times 100\%$$

$$= 30\%$$

Dengan demikian berikut hasil hitungan dari ketiga faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat sebagai berikut :

Faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat

$$= \frac{\text{Skor yang di peroleh}}{\text{Skor Maksimal}} \times 100\%$$

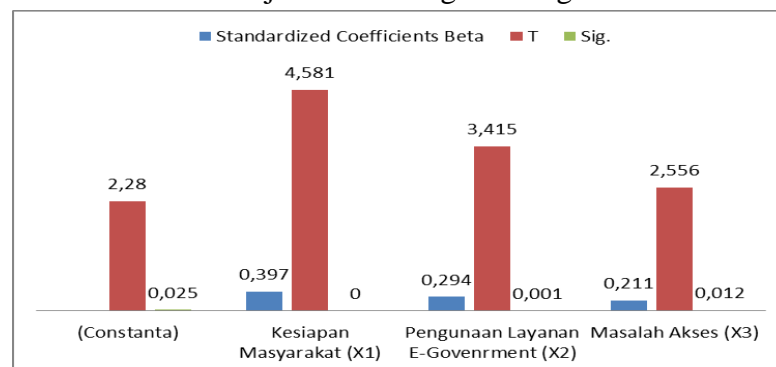
$$\text{Faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat} = \frac{3155}{343.89} \times 100\%$$

$$= 91.44\%$$

## 5. Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis regresi berganda digunakan untuk mengetahui pengaruh dari variabel kesiapan masyarakat (X1), penggunaan layanan *e-government* (X2) masalah akses (X3) partisipasi masyarakat (Y). Hasil *output* SPSS berikut:

Diagram 3. 25  
Hasil Uji Analisis Regresi Berganda



Sumber: Data primer yang diolah, 2016

Berdasarkan diagram 3.7 diperoleh hasil persamaan regresi, sebagai berikut:

$$Y = 0,0397X_1 + 0,294X_2 + 0,211X_3$$

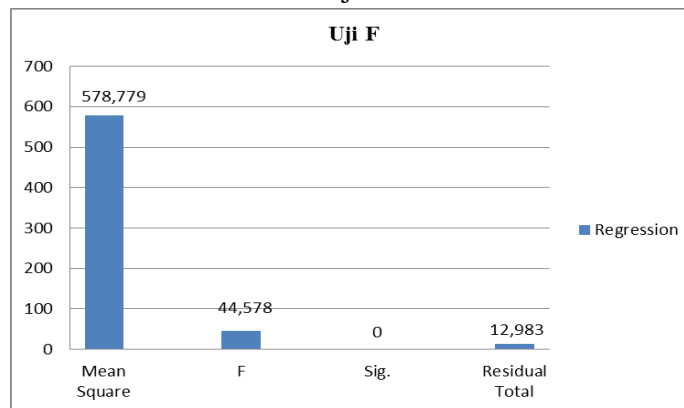
Berdasarkan hasil tersebut, persamaan regresi sebagai berikut:

- Koefisien variabel kesiapan masyarakat (X1) sebesar 0,0397. Nilai yang positif pada variabel kesiapan masyarakat menunjukkan bahwa variabel tersebut mempunyai pengaruh terhadap variabel dependen (partisipasi masyarakat), artinya jika kesiapan masyarakat semakin baik maka perilaku masyarakat untuk melakukan partisipasi dalam *e-government* Kabupaten Sleman semakin tinggi dan sebaliknya.
- Koefisien variabel penggunaan layanan *e-government* (X2) sebesar 0,294. Nilai yang positif pada variabel penggunaan layanan *e-government* menunjukkan bahwa variabel tersebut mempunyai pengaruh terhadap variabel dependen (partisipasi masyarakat), artinya jika penggunaan layanan *e-government* masyarakat semakin baik dan positif maka perilaku masyarakat untuk melakukan partisipasi dalam *e-government* Kabupaten Sleman semakin tinggi dan sebaliknya.

- c) Koefisien variabel Masalah Akses (X3) sebesar 0,211. Nilai yang positif pada variabel masalah akses menunjukkan bahwa variabel tersebut mempunyai pengaruh terhadap variabel dependen (partisipasi masyarakat), artinya jika informasi atau pengalaman masyarakat semakin sedikit maka semakin besar pengaruh masalah akses terhadap partisipasi dalam *e-government* Kabupaten Sleman dan sebaliknya.

## 6. Uji F

diagram 3. 26  
Hasil Uji F



Sumber: *Data primer yang diolah, 2016*

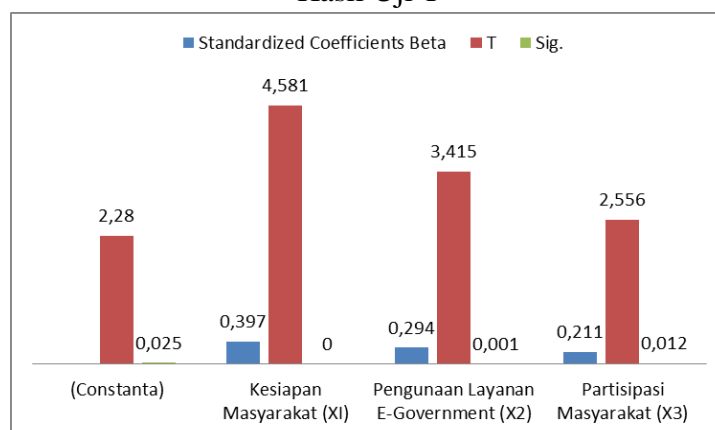
Berdasarkan diagram 3.26 hasil uji F di atas, maka hasil uji Rumusan Masalah dalam penelitian ini, sebagai berikut:

- a) Uji Devenden Variabel terhadap Indevenden Variabel

Berdasarkan hasil uji F (uji simultan), nilai signifikansi sebesar 0,000 yang berarti lebih kecil dari  $\alpha = 0,05$  maka dapat dinyatakan bahwa variabel kesiapan masyarakat, penggunaan layanan *e-government* dan masalah akses secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap variable partisipasi masyarakat dalam *e-government* Kabupaten Sleman

## 7. Uji T

Diagram 3. 27  
Hasil Uji T



Sumber: *Data primer yang diolah, 2016*

Berdasarkan diagram 3. 27 hasil uji T di atas, maka hasil uji rumusan masalah dalam penelitian ini, sebagai berikut:

a) Uji Faktor Kesiapan Masyarakat

Berdasarkan hasil uji t, Kesiapan Masyarakat memiliki nilai signifikan sebesar 0,000 mendekati  $\alpha = 0,05$  dengan koefisien regresi 0.397 (positif). Sehingga dapat dinyatakan bahwa kesiapan masyarakat memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap partisipasi masyarakat di Kabupaten Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta. Hal ini berarti untuk faktor pertama diterima dalam penelitian ini.

b) Uji Faktor Penggunaan Layanan *E-Government*

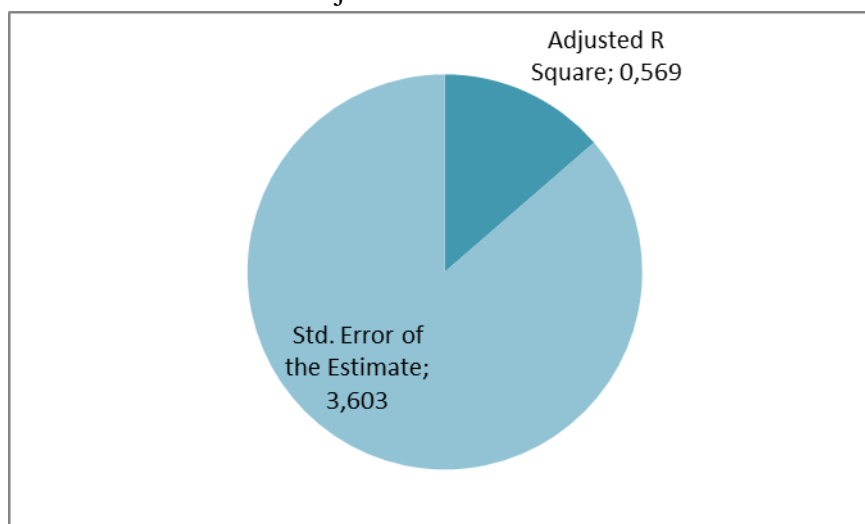
Berdasarkan hasil uji t, Penggunaan Layanan *E-Government* memiliki nilai signifikan sebesar 0,001 mendekati  $\alpha = 0,05$  dengan koefisien regresi 0.294 (positif). Sehingga dapat dinyatakan bahwa Penggunaan Layanan *E-Government* memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap partisipasi masyarakat di Kabupaten Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta. Hal ini berarti untuk Faktor kedua diterima dalam penelitian ini.

c) Uji Faktor Masalah Akses

Berdasarkan hasil uji t, Masalah Akses memiliki nilai signifikan sebesar 0,012 mendekati  $\alpha = 0,05$  dengan koefisien regresi 0.211 (positif). Sehingga dapat dinyatakan bahwa masalah akses memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap partisipasi masyarakat di Kabupaten Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta.

## 8. Uji Koefisien Determinasi( $R^2$ )

Diagram 3. 28  
Hasil Uji Koefisien Determinasi



Sumber: *Data primer yang diolah, 2016*

Berdasarkan diagram 3.28 tampilan *output* SPSS model *summary* besarnya *Adjusted R<sup>2</sup>* adalah 0,569. Hal ini berarti bahwa variasi variabel dependen, yaitu partisipasi masyarakat (Y) dalam model dapat dijelaskan oleh variabel independen.

## PEMBAHASAN

### 1. Partisipasi Masyarakat melalui *e-Government* di Kabupaten Sleman

Dari hasil analisis linkert partisipasi masyarakat maka diketahui bahwa tingkat partisipasi masyarakat melalui *e-Government* di Kabupaten Sleman, sebesar 50% . Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat masih **kurang baik** dalam berpartisipasi melalui *e-Government* Kabupaten Sleman pada tahun 2012-2015. Partisipasi masyarakat tersebut berdasarkan hasil jawaban responden dalam menanggapi pernyataan 8 pernyataan yang peneliti ajukan.

Nilai tertinggi terletak pada tolak ukur kedua yaitu “Kemudahan mendapatkan pelayanan melalui *e-Government* akan membantu pemecahan masalah pelayanan yang dihadapi masyarakat” dengan nilai 403. Dan nilai terendah berada pada tolak ukur ketiga yaitu “Masyarakat lebih tertarik mendapatkan pelayanan secara langsung dari pada melalui *e-Government*”.

Kemudian tolak ukur keputusan berpartisipasi mendapatkan nilai 399, artinya masyarakat berpartisipasi sesuai dengan keinginan dan yakin jika berpartisipasi melalui *e-Government* akan lebih cepat di respon oleh pemerintah. Lalu ada perilaku setelah berpartisipasi mendapatkan nilai 356, artinya setelah masyarakat berpartisipasi untuk kali pertama, Masyarakat Kabupaten Sleman akan berpartisipasi kembali. Tolak ukur yang terakhir sosialisai *e-Government* mendapatkan nilai sebesar 333, dari rincian jawaban responden masyarakat sudah mencari tahu informasi mengenai *e-Government*, namun sebagian lebih dari responden mendapatkan pemberitahuannya hanya melalui *website* pemerintah dan belum adanya pemberitahuan yang jelas dari Pemerintah Kabupaten Sleman mengenai pelayanan melalui *e-Government* ini.

Secara keseluruhan bahwa tingkat partisipasi masyarakat melalui *e-government* di Kabupaten Sleman masih kurang baik. Hasil ini di pengaruhi oleh 3 faktor : Kesiapan masyarakat sebesar 30%, kemudian penggunaan layanan *e-Government* sebesar 30% dan Masalah akses sebesar 30%, Jadi jika dijumlahkan maka 91.44% partisipasi masyarakat di Kabupaten Sleman sangat dipengaruhi oleh tiga faktor yang telah diajukan dalam penelitian ini.

### 2. Faktor-faktor yang Mempemngaruhi Partisipasi Masyarakat melalui *e-Government*

Berdasarkan tabel 3.24 hasil uji T di atas, maka faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat melalui *e-Government* sebagai berikut.

#### a) Faktor Kesiapan Masyarakat

Berdasarkan hasil uji t, Kesiapan Masyarakat memiliki nilai signifikan sebesar 0,000 mendekati  $\alpha = 0,05$  dengan koefisien regresi 0.397 (positif). Sehingga dapat dinyatakan bahwa kesiapan masyarakat memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap partisipasi masyarakat di Kabupaten Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta. Hal ini berarti untuk faktor pertama diterima dalam penelitian ini.

#### b) Faktor Penggunaan Layanan *E-Government*

Berdasarkan hasil uji t, Penggunaan Layanan *E-Government* memiliki nilai signifikan sebesar 0,001 mendekati  $\alpha = 0,05$  dengan koefisien regresi 0.294 (positif). Sehingga dapat dinyatakan bahwa Penggunaan Layanan *E-Government* memiliki



pengaruh yang positif dan signifikan terhadap partisipasi masyarakat di Kabupaten Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta. Hal ini berarti untuk Faktor kedua diterima dalam penelitian ini.

c) Faktor Masalah Akses

Berdasarkan hasil uji t, Masalah Akses memiliki nilai signifikan sebesar 0,012 mendekati  $\alpha = 0,05$  dengan koefisien regresi 0.211 (positif). Sehingga dapat dinyatakan bahwa masalah akses memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap partisipasi masyarakat di Kabupaten Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta.

## SIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Partisipasi masyarakat melalui *e-Government* Sejak tahun 2012 *e-Government* di Kabupaten Sleman mulai berjalan efektif sebagai pelaksanaan dari Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik. Penerapan *e-Government*, memberikan peluang kepada pemerintah untuk membuka akses pada masyarakat untuk berpartisipasi melalui *e-Government*, dengan menghapus sekat-sekat birokrasi yang kaku. Dalam penelitian ini, tampak masyarakat di Kabupaten Sleman sudah lebih mudah dalam berintraksi. Maka partisipasi masyarakat melalui *e-Government* akan meningkat. Berdasarkan hasil penelitian ini hanya sebagian responden yang sudah berpartisipasi melalui *e-Government* hal ini dibuktikan dengan keseluruhan hanya 50% masyarakat Kabupaten Sleman yang telah berpartisipasi melalui *e-Government*.
2. Penggunaan layanan melalui *e-Government* menjadi faktor yang paling berpengaruh dengan nilai rata-rata sebesar 365.33, Lalu kesiapan masyarakat mendapatkan nilai sebesar 355.67 dan yang terakhir masalah akses mendapatkan nilai sebesar 330.67. Dengan demikian semua faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat di Kabupaten Sleman dipengaruhi ketiga faktor diatas.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Bappenas, 2008. *Modul Penerapan Tata Pemerintahan Yang Baik (Good Public Governance) di Indonesia*. Jakarta.
- Sutoro, Eko, 2004. *Reformasi Politik dan Pemberdayaan Masyarakat*. Yogyakarta. APMD Press.
- Husaini, Usman dan Setiady, Purnomo. 2008. *Metode Penelitian Sosial*. Jakarta. Bumi Aksara.
- Indiahono, Dwiyanto, 2006. *Reformasi "Birokrasi Amplop" Mungkinkah?*. Yogyakarta: Gaya Media.
- Indrajid, Richardus eko. 2002. *Electronic Government: Strategi Pembangunan dan Pengembangan Sistem Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Digital*. Yogyakarta: Andi.
- Indrajit, Richardus Eko. 2005. *E-Government in Action: Ragam kasus dan implementasi sukses diberbagai belahan dunia*. yogyakarta: Andi. Hal. 75.
- Jimly Asshiddiqie. 2005. *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi* , Jakarta: Konstitusi Press.
- Juliansyah, Noor. 2011. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Kencana prenada Media Grub.

- Joeniarto. 1992. *Demokrasi dan sistem pemerintahan negara*. Jakarta. Bina aksara.
- Kencana, Inu. 2011. *Sistem Pemerintahan Indonesia*. Jakarta. Rineka Cipta.
- Krina, Loina. 2003. *Indikator & Alat Ukur Prinsip Akuntabilitas, Transparansi & Partisipasi, Sekretariat Good Public Governance Badan Perencanaan Pembangunan Nasional*. Jakarta: Gramedia.
- Krina, Lalolo, 2003. *Indikator Dan Tolok Ukur Akuntabilitas, Transparansi dan Partisipasi*. Sekretariat Pengembangan Kebijakan Nasional Tata Pemerintahan yang Baik, BAPPENAS.
- Manan. Bangir. 2001. *Teori dan Politik Konstitusi*. Jakarta. Dirjen Dikti Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- Purwanto, Erwan Agus, 2008. *Pelayanan Publik Partisipatif* dalam buku *Mewujudkan Good Governance melalui Pelayanan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Rosyada, Dede. 2000. *Demokrasi, Hak Asasi Manusia Dan Masyarakat Madani*, Jakarta: ICCE UIN Syarif Hidayatullah.
- S, Pamudji, 1985. *Administrasi Publik: Analisa Sistem Sistem Bagi Administrasi Yang Efektif*. Jakarta. Bina Aksara.
- Sj Sumarto, Hetifah. 2003. *Inovasi, Partisipasi dan Good Governance*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Sugiyono. 2005. *Memahami penelitian kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Sutiono, Agus, dan TS, Ambar, 2004. *SDM Aparatur Pemerintah dalam Birokrasi Publik di Indonesia* dalam buku *Memahami Good Governance dalam Perspektif Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta: Gaya Media.
- Sumodiningrat, Gunawan. 1999. *Pemberdayaan Masyarakat & JPS*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Syakhroza, Ahmad. (2005). *Corporate Governance: Sejarah dan Perkembangan, Teori, Model dan Sistem Governance serta Aplikasinya pada Perusahaan BUMN. Pidato Pengukuhan Guru Besar. Universitas Indonesia*. Jakarta.
- Tjandra. Riawan. 2009. *Teori dan Praktek Tata Usaha Negara*. Yogyakarta. Universitas Atmajaya Yogyakarta.

## **Jurnal**

- Renza Azhari dan Intan Sari H. Z. 2008. *Model-Model User Acceptance*. Jurnal Fakultas Ilmu Komputer Universitas Indonesia.
- Stevanus Wisnu Wijaya. 2009 *Kajian Teoritis Technology Acceptance Model Sebagai Model Pendekatan untuk Menentukan Strategi Mendorong Kemauan Pengguna dalam Menggunakan Teknologi Informasi dan Komunikasi*, Jurnal Universitas Sanata Dharma Yogyakarta
- Arief Wibowo. 2009. *Kajian Tentang Perilaku Pengguna Sistem Informasi dengan Pendekatan Technology Acceptance Model (TAM)*, Jurnal Fakultas Teknologi Informasi Universitas Budi Luhur Jakarta.

## **Regulasi Pemerintah**

- R.I., Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2003 Tentang Kebijakan, Strategi Nasional Pengembangan. Kementerian PPN/Bappenas. Jakarta.

R.I., UU No. 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah pasal 1 ayat 2 dan 3.

R.I., Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

R.I., UU No. 11 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik.

### **Internet**

Arif Irwanto. *Good Governance*, 05 Januari 2011. <http://www.inkindo-jateng.web.id/?p=779>. Pada Senin, 23 November 2015, jam 14.01.

IDSA, *Awarding IDSA*, 02 Maret 2015, <http://www.idsa.co.id>, diunduh pada Rabu, 14 oktober 2015, jam 20.30 WIB.

Lembaga Administrasi Negara. 2000. *Konsep Good Governance Tahun 2000*. <http://www.lan.go.id/> diakses pada 2 Oktober 2015, jam 21.00 WIB.

Pemerintah Kabupaten Sleman, *Profil Kabupaten Sleman*, 03 februari 2014, <http://www.slemankab.go.id/profil/profil-pemerintah-kabupaten-sleman/kelembagaan>, diakses pada ju'at, 23 oktober 2015, jam 11.21 WIB.

Pemerintah Kabupaten Sleman , *Prestasi Kabupaten Sleman*, 23 Maret 2014, <http://www.slemankab.go.id/6850/sleman-raih-reka-cipta-bhakti-husada.slm>, diakses pada Rabu, 14 oktober 2015, jam 20.35 PM.

*Struktur Organisasi Pemerintahan*, <http://www.bukupr.com/2012/01/struktur-organisasi-pemerintahan.html> diakses pada Selasa, 17 november 2015, jam 13.09 WIB.

*Unaitid Nations Development. Unsur Good Governance Tahun 2000*. <http://www.id.undp.org/> diakses pada 2 Oktober 2015, jam 21.00 WIB.

Pengaruh Globalisasi terhadap perilaku pemerintahan, <http://www.sejarah-negara.com/pengaruh-globalisasi-terhadap-perilaku/>. Di Akses Pada Selasa, 17 Mei 2016, Jam 19.02 PM

Wikipedia, *Tata Laksana Pemerintahan yang Baik*, 23 Maret 2014, [https://id.wikipedia.org/wiki/Tata\\_laksana\\_pemerintahan\\_yang\\_baik](https://id.wikipedia.org/wiki/Tata_laksana_pemerintahan_yang_baik), Di Akses Pada Sealasa, 13 Oktober 2015, Jam 21.02 PM.

Wikipedia, *Pemerintahan Elektronik*, 25 Oktober 2014, [https://id.wikipedia.org/wiki/Pemerintahan\\_elektronik](https://id.wikipedia.org/wiki/Pemerintahan_elektronik), Di Akses Pada Selasa, 13 Oktober 2015, jam 20.59 PM.

Wikipedia, *Kabupaten*, 14 juli 2014, <https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten> diakses pada tanggal Selasa, 17 November 2015, jam 12.57 WIB